



**KEPALA DESA TAMANGEDE
KECAMATAN GEMUH KABUPATEN KENDAL**

**PERATURAN KEPALA DESA TAMANGEDE
NOMOR 1 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT DD)
TAHUN ANGGARAN 2024**



**DESA TAMANGEDE
KECAMATAN GEMUH KABUPATEN KENDAL**



KEPALA DESA TAMANGEDE KECAMATAN GEMUH
KABUPATEN KENDAL
PERATURAN KEPALA DESA TAMANGEDE
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA) TAHUN ANGGARAN 2024
DI DESA TAMANGEDE KECAMATAN GEMUH KABUPATEN KENDAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TAMANGEDE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 pada pasal 16 ayat (2) huruf a yang berbunyi program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 2 Tahun 2024 tanggal 8 Februari 2024 tentang Musyawarah Desa Khusus Penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) Tahun Anggaran 2024 Desa Tamangede Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) Tahun Anggaran 2024 Desa Tamangede Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

- Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 7. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 8. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi corona virus disease

2019 (covid 19) dan /atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional, dan /atau stabilitas sistem keuangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);

12. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur /Tengah /Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4537);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan kedaruratan Bencana pada Kondisi tertentu;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

- 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 22. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 23. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
 24. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
 25. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
39. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
40. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
41. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
42. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
43. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
44. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
45. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
46. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
47. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
48. Surat Plt.Direktur Jendral Pembangunan Desa dan Perdesaan Nomor 5/PR.03.01/III/2021 tanggal 1 Maret 2021 dengan hal Pemuktakhiran Data IDM berbasis SDGs Desa;
49. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 / PMK.02 /2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
50. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1289);

51. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 819);
52. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
53. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759);
54. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
55. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
56. Surat Edaran Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
57. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 18);
58. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 1);
59. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
60. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 2 Seri E No. 2);
61. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);

62. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 162);
63. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 2);
64. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);
65. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 4);
66. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 12);
67. Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kendal kepada Camat Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2013 Nomor 10 Seri E No. 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kendal kepada Camat Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten 2013 Nomor 26 Seri E No. 15);
68. Peraturan Bupati Kendal Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kendal kepada Camat Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten 2013 Nomor 26 Seri E No. 15);
69. Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 16 seri E No. 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 35);
70. Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Desa di Kabupaten Kendal

(Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 52 Seri E No. 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa untuk Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 3 Seri E No. 3);

71. Peraturan Bupati Kendal Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa untuk Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 3 Seri E No. 3),
72. Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 6),
73. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No. 41),
74. Peraturan Bupati Kendal Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standarisasi Biaya dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 72 Seri E No. 45);
75. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 80 Seri E No 47);
76. Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 82 seri E No. 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 79 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 80),
77. Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 26),

78. Peraturan Bupati Kendal Nomor 34 Tahun 2017 tentang Penyusunan Peraturan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 35);
79. Peraturan Bupati Kendal Nomor 37 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kegiatan Pembangunan Desa, dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 38);
80. Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 51) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 34);
81. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
82. Peraturan Bupati Kendal Nomor 30 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 30);
83. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 38);
84. Peraturan Bupati Kendal Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021- 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7);
85. Peraturan Bupati Kendal Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 8);
86. Peraturan Bupati Kendal Nomor 17 Tahun 2021 tanggal 3 Maret 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 17);
87. Peraturan Bupati Kendal Nomor 26 Tahun 2021 tanggal 7 April 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 26);

88. Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Yang Dibiayai Dari Dana Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 26);
89. Peraturan Bupati Kendal Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati kendal Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 28);
90. Peraturan Bupati Kendal Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 53);
91. Peraturan Bupati Kendal Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 9);
92. Peraturan Bupati Kendal Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Berbasis Dusun di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 13);
93. Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 40);
94. Peraturan Bupati Kendal Nomor 75 Tahun 2022 tentang Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 75);
95. Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 2);
96. Peraturan Bupati Kendal Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan dan Pengembangan Desa Wisata (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 20);
97. Peraturan Bupati Kendal Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 23);
98. Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 27);
99. Peraturan Bupati Kendal Nomor 56 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah

- Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 56);
100. Peraturan Bupati Kendal Nomor 59 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 59);
 101. Peraturan Desa Tamangede Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Tamangede Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Tamangede Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Tamangede Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Tamangede Tahun 2022 Nomor 2);
 102. Peraturan Desa Tamangede Nomor 7 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tamangede Tahun 2018 Nomor 9);
 103. Peraturan Desa Tamangede Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tamangede Tahun 2020 sampai dengan 2026 (Lembaran Desa Tamangede Tahun 2020 Nomor 4);
 104. Peraturan Desa Tamangede Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Tamangede Tahun 2023 Nomor 2).
 105. Peraturan Desa Tamangede Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Tamangede Tahun 2023 Nomor 5);
 106. Peraturan Kepala Desa Tamangede Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Desa Tamangede Tahun 2023 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA) TAHUN ANGGARAN 2024 DI DESA TAMANGEDE KECAMATAN GEMUH KABUPATEN KENDAL.
- KESATU : Menetapkan Daftar Nama Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Sasaran Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) berdasarkan kriteria ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 pasal 17, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
- a. Keluarga Miskin yang berdomisili didesa bersangkutan berdasarkan data yang ditetapkan Pemerintah, yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) data pensasaran, percepatan penghapusan kemiskinan Ekstrem; atau

berdasarkan data yang ditetapkan Pemerintah, yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) data pensasaran, percepatan penghapusan kemiskinan Ekstrem; atau

- b. Keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 (dua) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran, percepatan penghapusan kemiskinan Ekstrem;
- c. Keluarga Miskin yang kehilangan Mata Pencaharian;
- d. Keluarga Miskin yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
- e. Keluarga Miskin yang tidak menerima bantuan Sosial program keluarga harapan;
- f. Rumah Tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan atau
- g. Perempuan kepala rumah tangga dari keluarga miskin.

- KETIGA : Besaran BLT Desa sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat untuk bulan pertama sampai dengan bulan ke dua belas.
- KEEMPAT : Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan kepala Desa ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Tamangede Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku terhitung sejak pada tanggal 1 Januari 2024. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Tamangede

Ditetapkan di : Tamangede
Pada tanggal : 9 Februari 2024
KEPALA DESA TAMANGEDE,

Ttd

MUNADI

Diundangkan di Desa Tamangede
Pada tanggal, 9 Februari 2024
SEKRETARIS DESA TAMANGEDE,



BAYU AJI DWICAHYO

BERITA DESA TAMANGEDE TAHUN 2024 NOMOR 1

LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA DESA TAMANGEDE NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2024

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2024

NO	NAMA PENERIMA	NIK	NO. KK	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	ALAMAT	PEKERJAAN	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA	BESARAN BLT DESA / BULAN (Rp)
1	CHABIB BASIR	3324110102720002	3324112504110001	KENDAL, 01-02-1972	RT 01 RW 01	WIRASWASTA	3 ORANG	300.000.
2	MUSLIKAH	3326084405580001	3324111201220004	KENDAL, 04-05-1958	RT 01 RW 01	BURUH	1 ORANG	300.000.
3	ENDANG PURWANTI	3324115111880001	3324112807160001	KENDAL, 01-11-1988	RT 01 RW 01	IBU RUMAH TANGGA	4 ORANG	300.000
4	JOKO PURNOMO	332411510890001	3324112612180003	KENDAL, 15-10-1989	RT 02 RW 01	WIRASWASTA	5 ORANG	300.000.
5	SARIATUN	3324117112670003	3324110808086105	KENDAL, 31-12-1967	RT 02 RW 01	IBU RUMAH TANGGA	1 ORANG	300.000.
6	GUNTORO	332411002690002	3324110808086256	KENDAL, 10-02-1969	RT 02 RW 01	WIRASWASTA	5 ORANG	300.000.
7	RIZAL KURNIWAN	3324110410960001	3324112212200001	KENDAL, 03-10-1996	RT 02 RW 01	BURUH	1 ORANG	300.000.
8	SOEDJOKO	3324110501500002	3324110808086846	KENDAL, 05-01-1950	RT 02 RW 01	WIRASWASTA	3 ORANG	300.000.
9	TANOYO	3324112705770001	3324110808086781	KENDAL, 27-05-1977	RT 02 RW 01	WIRASWASTA	3 ORANG	300.000.
10	CHAERUDIN	3324110301740001	3324110808086051	KENDAL, 03-01-1974	RT 04 RW 01	WIRASWASTA	2 ORANG	300.000.
11	SULIMAN	3324113112580030	3324110109210001	KENDAL, 31-12-1958	RT 04 RW 01	BURUH	1 ORANG	300.000.
12	USMAN	3324100810800001	3324110306150001	KENDAL, 08-10-1980	RT 04 RW 01	PETANI	4 ORANG	300.000.
13	KONAAH	3324116903710003	3324110808087139	KENDAL, 29-03-1971	RT 04 RW 01	PETANI	3 ORANG	300.000.
14	WARSI	3324117112450053	33241108000848	KENDAL, 31-12-1945	RT 05 RW 01	IBU RUMAH TANGGA	2 ORANG	300.000.
15	SUPARDI	3324110101490003	3324110808086510	KENDAL, 01-01-1949	RT 05 RW 01	WIRASWASTA	2 ORANG	300.000.
16	MUH FAOZI	3324112408770001	3324110808087062	KENDAL, 24-08-1977	RT 05 RW 01	TIDAK BEKERJA	3 ORANG	300.000.
17	MOH WAHYUDIN	3324110506850002	3324110812160004	KENDAL, 05-06-1985	RT 06 RW 01	WIRASWASTA	3 ORANG	300.000.

18	MOH AUFA	3324113001780003	3324110808087120	KENDAL, 30-01-1978	RT 06 RW 01	WIRASWASTA	4 ORANG	300.000.
19	DHARYONO	3324111411630001	3324110808086248	KENDAL, 14-11-1963	RT 01 RW 02	WIRASWASTA	2 ORANG	300.000.
20	KOMARUDIN	3324080405610003	3324112606130002	KENDAL, 04-05-1961	RT 01 RW 02	WIRASWASTA	3 ORANG	300.000.
21	OKTIVA DWI C	3324111410870001	3324110111160001	KENDAL, 14-10-1987	RT 02 RW 02	WIRASWASTA	4 ORANG	300.000.
22	HARIYANTO	3324112306510001	3324110808086725	KENDAL, 23-06-1951	RT 03 RW 02	PEDAGANG	2 ORANG	300.000.
23	A. SUNAWAR	3324113112700008	3324110808086592	KENDAL, 31-12-1970	RT 03 RW 02	WIRASWASTA	6 ORANG	300.000.
24	SAFAATI	3324115905730001	3324110808086147	KENDAL, 19-05-1973	RT 04 RW 02	IBU RUMAH TANGGA	3 ORANG	300.000.
25	SOFIYAH	3324114212700001	3324110808086120	KENDAL, 02-12-1970	RT 05 RW 02	PEDAGANG	4 ORANG	300.000.
26	ISTIANAH	3324117112500024	3324111608190001	KENDAL, 05-12-1950	RT 05 RW 02	IBU RUMAH TANGGA	1 ORANG	300.000.
27	RUPIAH	3324117112640007	3324112812170003	KENDAL, 31-12-1964	RT 05 RW 02	IBU RUMAH TANGGA	2 ORANG	300.000.
28	MARKUS SUTIRTO	3324111312540001	3324110808086567	KENDAL, 13-12-1954	RT 06 RW 02	WIRASWASTA	2 ORANG	300.000.
29	SITI RONDHIYAH	3324114108620001	3324110808085999	KENDAL, 01-08-1962	RT 06 RW 02	IBU RUMAH TANGGA	4 ORANG	300.000.
30	SUGJANTO	3372032401720004	3324111002170001	KENDAL, 24-01-1972	RT 06 RW 02	KARYAWAN SWASTA	4 ORANG	300.000.
31	M. IDRIS ULUMUDDIN	3324111705860001	3324113009210007	KENDAL, 17-05-1986	RT 06 RW 02	WIRASWASTA	3 ORANG	300.000.
32	MAHMUDAH	3324115204730002	3324111504120001	KENDAL, 12-04-1973	RT 07 RW 02	IBU RUMAH TANGGA	3 ORANG	300.000.
33	EROL KARYA YODHA	3324112204870003	3324112304150003	KENDAL, 22-04-1987	RT 08 RW 02	KARYAWAN SWASTA	3 ORANG	300.000.
34	MASHURI	3324112103740005	3324110808086988	KENDAL, 21-03-1974	RT 08 RW 02	WIRASWASTA	4 ORANG	300.000.
35	Y SUPIAM	3324117112740005	3324111411220006	KENDAL, 31-12-1974	RT 09 RW 02	BURUH	1 ORANG	300.000.
36	RACHMADI	3324112405570001	3324110808085772	KENDAL, 24-05-1957	RT 09 RW 02	BURUH	3 ORANG	300.000.
37	ISNAWI	3324110410760001	3324110808085805	KENDAL, 04-10-1976	RT 10 RW 02	WIRASWASTA	3 ORANG	300.000.
38	TUGIYO	3324112404510002	3324110808086160	KENDAL, 24-04-1951	RT 10 RW 02	WIRASWASTA	4 ORANG	300.000.
39	SITI AISAH	3324115107650002	3324110808086308	KENDAL, 11-07-1965	RT 10 RW 02	BURUH	1 ORANG	300.000.
40	FERIZA WIJAYA	3324111402840004	3324111010160002	KENDAL, 14-02-1984	RT 10 RW 02	WIRASWASTA	3 ORANG	300.000.
41	AWALIYAH	3324095404810002	3324110202120002	KENDAL, 01-06-1976	RT 01 RW 03	WIRASWASTA	4 ORANG	300.000.
42	MUH MAHFUR	3324101708870007	3324112808150006	KENDAL, 17-08-1987	RT 01 RW 03	WIRASWASTA	4 ORANG	300.000.
43	NUR CHIMAYAH	3324114507800002	3324110507220005	KENDAL, 05-07-1980	RT 01 RW 03	WIRASWASTA	2 ORANG	300.000.
44	HIDAYAH	3324114401840001	3324111603120001	KENDAL, 04-01-1984	RT 01 RW 03	WIRASWASTA	5 ORANG	300.000.
45	M. ABDUL BASIR	3324112804800003	3324110808087020	KENDAL, 28-04-1980	RT 01 RW 03	KARYAWAN SWASTA	5 ORANG	300.000.
46	MAFUDAH AZIDAH	3324115901930001	3324110705150003	KENDAL, 19-01-1993	RT 02 RW 03	WIRASWASTA	4 ORANG	300.000.
47	SITI KHOIRIYAH	3324116310860002	3324112711230001	KENDAL, 23-10-1986	RT 02 RW 03	WIRASWASTA	1 ORANG	300.000.
48	MAS UDHAH	3324115505630002	3324110808085952	KENDAL, 15-05-1963	RT 02 RW 03	BURUH	1 ORANG	300.000.
49	SRI YULIYAMTO	3324141011880003	3324111211140001	BATANG, 10-11-1988	RT 02 RW 03	WIRASWASTA	4 ORANG	300.000.
50	MUNAJAT	3324113112680001	3324110808086278	KENDAL, 31-12-1968	RT 02 RW 03	WIRASWASTA	2 ORANG	300.000.

51	ABDUR ROHMAN	3324112711800003	3324112010140004	KENDAL, 27-11-1980	RT 04 RW 03	WIRASWASTA	4 ORANG	300.000.
52	MAKRIFAH	3324116207670001	3324111106190003	KENDAL, 22-07-1967	RT 05 RW 03	BURUH	2 ORANG	300.000.
53	MUHAMMAD DANI	3324112206920001	3324112901200007	KENDAL, 22-06-1992	RT 05 RW 03	WIRASWASTA	3 ORANG	300.000.
54	FATKURROHMAN	3324111204830002	3324110201240001	KENDAL, 12-04-1983	RT 01 RW 04	WIRASWASTA	3 ORANG	300.000.
55	SITI MAEMONAH	3324114408910001	3324111604140001	KENDAL, 04-08-1991	RT 01 RW 04	IBU RUMAH TANGGA	3 ORANG	300.000.
56	FAUZANAH	3324114901690002	3324110808086975	KENDAL, 09-01-1969	RT 02 RW 04	BURUH	4 ORANG	300.000.
57	NUR KHOLIQ	3324111011780002	3324110808086560	KENDAL, 10-11-1978	RT 02 RW 04	BURUH	4 ORANG	300.000.
58	ROSIDIN	3324110711840001	3324112304100001	KENDAL, 07-11-1974	RT 03 RW 04	BURUH	4 ORANG	300.000.
59	SUPRIYATIN	3324111901800001	3324110808086503	KENDAL, 19-01-1980	RT 04 RW 04	WIRASWASTA	5 ORANG	300.000.
60	SUYANTI	3315056103740001	3324112208130004	GROBOGAN, 21-03-1974	RT 04 RW 04	BURUH	4 ORANG	300.000.

Kepala Desa Tamangede

